



2025

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jalan Rohana Kudus – Painan
Email: kesbangpolkabpessel7@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberi kekuatan sehingga dokumen Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Triwulan I Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Evaluasi dan pengendalian terhadap hasil RKPD untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dilakukan terhadap 6 Program dimana 1 (satu) Program Urusan Penunjang Pemerintahan Kab/Kota dan 5 (Lima) Program Prioritas yang dilaksanakan oleh pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan melalui 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/ kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan daerah kita, terimakasih.

Billahhi taufik wal hidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, 9 April 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan,



GESTROJONI, S.Pd., M.M.
NIP. 19691106 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025.....	5
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program pada Renstra Perangkat Daerah Sampai Triwulan I Tahun 2025	6
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan I	10
BAB III PEMBAHASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	12
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	14
4.1 Kesimpulan	14
4.2 Rekomendasi	15
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Pelaksanaan Triwulan I Tahun Anggaran 2025.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal (1) perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara. Jadi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang. Sedangkan Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan dilaksanakan melalui APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD yang tersebar dalam Renja-PD dan sehingga keselarasan antara APBD pelaksanaannya dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan untuk perencanaan selanjutnya.

Evaluasi RKPD Tahun 2025 ini, didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan triwulan I tahun 2025, dalam mengevaluasi fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil

evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Pelaksanaan Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjamin konsistensi dan keselarasan antara tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Organisasi Perangkat Daerah dengan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Renstra Organisasi Perangkat Daerah.
2. Untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Organisasi Perangkat Daerah telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.
3. Memberikan gambaran capaian terhadap target kinerja dan pendanaan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025.
4. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025.
5. Merumuskan kesimpulan berupa rekomendasi dan saran untuk tindak lanjut sebagai bahan masukan dalam peningkatan kinerja Pembangunan daerah.
6. Menjadikan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai basis data untuk keperluan evaluasi lainnya.

BAB II

EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Dalam mengevaluasi capaian kinerja program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan capaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja sudah berorientasi pada capaian hasil atau *outcome* dari masing-masing program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan untuk capaian keuangan dihitung dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan realisasi keuangan per triwulan sampai dengan triwulan I.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penilaian rata-rata persentase capaian kinerja dan predikat kinerja program adalah sebagai berikut:

Pengukuran Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA (TAHUNAN) (PERMENDAGRI 86/2017)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

**Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan
Sasaran Program Dalam RKPD Triwulan I Tahun 2025**

No	Program	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(%)	Kategori	(%)	Kategori
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20	SR	22,69	SR
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	17,4	SR	0	SR
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	0	SR	0	SR
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	87,95%	T	13,71	SR
5.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	SR	0	SR
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	20	SR	1,63	SR
Rata-Rata Capaian		24,23	SR	12,68	SR

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Renstra Perangkat Daerah Sampai Triwulan I Tahun 2025

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan melalui 5 Kegiatan dengan 17 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, dengan anggaran resntra sebesar Rp.31.652.218.175,- realisasi keuangan sampai triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.12.583.568.828,- atau

42,14% (sangat rendah). Untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tingkat capaian kinerja Renstra sampai dengan tahun 2025 pada triwulan I adalah sebesar 85% (tinggi).

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dilaksanakan melalui 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama. Program ini dapat terlaksana dengan anggaran pada Renstra sebesar Rp.5.788.797.536,- dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.979.627.495,- atau 16,92% (sangat rendah). Untuk Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan tingkat capaian kinerja pada Renstra sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 52,43% (rendah). Pelaksanaan kegiatan ideologi ini selain dari pelaksanaan upacara hari besar nasional juga dan Pembentukan kegiatan Paskibraka. Pelaksanaan Paskibraka akan dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2025. Upacara hari besar nasional yang terlaksana pada Triwulan I ini adalah sebanyak 1 upacara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hari Kesadaran Nasional (17 Februari 2025)

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Penyelenggaraan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dilakukan melalui 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang

Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk tahun 2025 total anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.51.268.643.557,-. Untuk realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp.55.065.049.239,- atau 107,4% (sangat tinggi). Capaian kinerja Renstra sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 70,59% (sedang). Tahun 2025 ini pelaksanaan Program ini berupa hibah keuangan kepada 11 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian hibah kepada 11 Partai Politik rencana akan diberikan pada bulan Juni tahun 2025.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Penyelenggaraan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tidak adanya anggaran untuk tahun 2025 memiliki capaian kinerja Renstra sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah 87,95% (tinggi) dan anggaran pada Renstra sebesar Rp.1.488.580.547,- dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.83.827.110,- atau 5,63% (sangat rendah). Penambahan pencatatan Ormas triwulan I ada sebanyak 4 (empat) Ormas, sehingga jumlah Ormas yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebanyak 73 Ormas.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya untuk tahun 2025 tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran. Sedangkan capaian kinerja Renstra sampai dengan tahun 2025 adalah 23,33% (sangat rendah) dan anggaran pada Renstra sebesar Rp.6.498.808.486,-

dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.210.605.316,- atau 3,24% (sangat rendah).

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Penyelenggaraan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dilakukan melalui 1 Kegiatan dan 3 sub kegiatan. Pada program ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memfasilitasi potensi konflik yang terjadi selama tahun 2025, untuk triwulan I konflik yang terfasilitasi adalah sebanyak 4 Konflik. Sub kegiatan yang memiliki anggaran hanya dua sub kegiatan yaitu (1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, pada sub kegiatan ini akan melaksanakan Hibah POLRES dengan anggaran sebesar Rp85.000.00,-. (2) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dengan anggaran sebesar Rp130.000.000. Total anggaran program pada Renstra sebesar Rp.8.670.038.645,- dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.1.386.318.527,- atau 15.99% (sangat rendah). Capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 85% (tinggi).

Untuk sub kegiatan yang memfasilitasi konflik dan pengawasan Orang asing terletak pada 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah. Sub kegiatan ini indikatornya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Capaian kinerja sub kegiatan ini pada triwulan I adalah 85 Orang. 85 orang di sini merupakan orang yang mengikuti Rapat Koordinasi penanganan konflik yang terjadi di Pesisir Selatan.

- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Sub kegiatan ini indikatornya adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Capain kinerja triwulan I dari sub kegiatan monitoring evaluasi adalah 0 Laporan. Laporan akan dilampirkan pada triwulan II.
- c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan I

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan akumulasi realisasi target kinerja dan anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja.

Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra.

Capaian Kinerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Program	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(%)	Kategori	(%)	Kategori
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85	T	42,14	SR
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	52,43	R	16,92	SR
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	70,59	S	107,40	ST
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	87,95	T	5,63	SR
5.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	23,33	SR	3,24	SR
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	85	T	15,99	SR
	Rata-Rata	67,38	S	31,89	SR

BAB III

PEMBAHASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kajian terhadap capaian indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 900/ 08 /BKPol-PS/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026. Penetapan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	65 (B)
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	-
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	-
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	%	100

	Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Politik	%	-
--	-----------------------------------	--	---	---

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bentuk pengendalian dalam memastikan pencapaian kinerja antara dokumen Renstra dan program yang telah terlaksana di masing-masing bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja dan standar yang ditetapkan sebagaimana indikator kinerja program dan kegiatan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibandingkan dengan realisasi masukan, keluaran, serta hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk menilai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan capaian kinerja sasaran, keluaran, serta hasil untuk mencapai daya guna dan hasil guna berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta kemanfaatan.

Mempedomani hasil evaluasi sampai dengan triwulan I ini didapat rata rata capaian kinerja sebesar 67,38% (sedang) dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 31,89% (sangat rendah). Capaian kinerja di kategorikan rendah disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 2025 tidak memiliki anggaran sehingga belum dapatnya terlaksana pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pada tahun 2025;
2. Tidak adanya Sumber Daya Manusia (Analisis Kebijakan) yang melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

4.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja OPD dapat cepat diketahui.
- b. Kepala OPD hendaknya lebih menata strategi dalam pengendalian pelaksanaan/ pemantauan dan evaluasi pada Organisasi Perangkat kerjanya.
- c. Setiap PPTK perlu upaya ekstra agar capaian kinerja program dan kegiatan dapat tercapai lebih cepat sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan daerah/ perangkat daerah.
- d. Dalam pengisian tabel pada Laporan RKPD selalu berkoordinasi dengan Bapedalitbang.

LAMPIRAN

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
Priode Pelaksanaan: TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan Target kinerja Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan yang Mengacu pada Sasaran RKPD

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP	A (82)	0	0
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi	91	0	0
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	a. Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	100%	100%	100
		b. Cakupan Peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Politik	60%	0%	0

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab										
								(6)		(7)		(8)		(9)				(10)			(11)		(12)		(13)	14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		(16)
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		(16)				
		8			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		105.367.086.946		70.299.524.405		5.509.908.585		763.779.566		-		-		-		763.779.566		71.063.303.971							
		8	01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		105.367.086.946		70.299.524.405		5.509.908.585		763.779.566								763.779.566		71.063.303.971							
1.	Sasaran RPJMD: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Sasaran Sasaran Cascading 1: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Sasaran Cascading 2: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	31.652.218.175	80,00%	12.583.568.828	20%	3.324.909.514	5,00%	754.307.456						5%	754.307.456	85%	13.337.876.284	85,00%	42,14%					
		8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.124.177.516	80,00%	128.016.300	20%	38.882.700	1,00%	1.777.000						1%	1.777.000	81%	129.793.300	81,00%	11,55%				
		8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	160.596.788	16 Dokumen	128.016.300	4 Dokumen	38.882.700	1 Dokumen	1.777.000					1 Dokumen	1.777.000	17 Dokumen	129.793.300	85,00%	80,82%				
		8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	160.596.788	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	0,00%				
		8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20 Dokumen	160.596.788	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	0,00%				
		8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	160.596.788	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	0,00%				
		8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	160.596.788	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	0,00%				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)			(13)		14 = 7 +13
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)	(16)		
		8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	160.596.788	-	-	-	-							-	-	-	-	-	0,00%		
		8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	160.596.788	-	-	-	-							-	-	-	-	-	0,00%		
		8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	15.663.757.454	80,00%	9.669.350.028	20%	2.539.003.208	4,80%	620.569.588						4,80%	620.569.588	84,80%	10.289.919.616	84,80%	65,69%	
		8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1320 Orang/Bulan	10.345.636.653	1021 Orang/ Bulan	9.200.693.012	240 Orang/Bulan	2.482.963.208	60 Orang/ Bulan	613.649.588						60 Orang/Bulan	613.649.588	1081 Orang/Bulan	9.814.342.600	81,89%	94,86%	
		8	01	01	2.01	0002	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	759.731.543	48 Dokumen	468.657.016	12 Dokumen	56.040.000	3 Dokumen	6.920.000						3 Dokumen	6.920.000	51 Dokumen	475.577.016	85,00%	62,60%	
		8	01	01	2.01	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	759.731.543	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	0,00%		
		8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	759.731.543	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	0,00%		
		8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Laporan	759.731.543	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	0,00%		
		8	01	01	2.01	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	60 Dokumen	759.731.543	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	0,00%		
		8	01	01	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	759.731.543	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	0,00%		
		8	01	01	2.01	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60 Dokumen	759.731.543	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	0,00%		
		8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	21.000.000	-	0	0%	-	-	0						0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV									
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		(16)				
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)		
		8 01 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	3.000.000	-	0	-	-	-	0							-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8 01 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	1.470.000	-	-	-	0							-	-	2 Dokumen	1.470.000	10,00%	49,00%		
		8 01 01 2.03 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20 Laporan	3.000.000	-	0	-	-	-	0							-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8 01 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	3.000.000	-	0	-	-	-	0							-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8 01 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	3.000.000	-	0	-	-	-	0							-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	3.000.000	-	0	-	-	-	0							-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8 01 01 2.03 0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	3.000.000	-	0	-	-	-	0							-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85%	1.056.333.850	67,00%	14.000.100	0%	37.588.000	-	-							-	-	67,00%	14.000.100	78,82%	1,33%		
		8 01 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	215.506.250	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	46.549.350	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen	64.651.875	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8 01 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20 Dokumen	68.962.000	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		8 01 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20 Dokumen	64.651.875	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		8 01 01 2.05 0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5 Orang	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab						
								(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)				(7)			(8)		(9)		(10)	
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)	
		8	01	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5 Laporan	25.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8	01	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	5 Orang	25.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	471.012.500	8 Orang	14.000.100	1 Orang	37.588.000	-	0			-	-	8 Orang	14.000.100	80,00%	2,97%		
		8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	5 Orang	25.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8	01	01	2.05	0001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	5 Orang	25.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	3.061.189.685	79,82%	1.127.546.920	6%	221.041.941	1,40%	52.493.620			1,40%	52.493.620	81,22%	1.180.040.540	95,55%	38,55%		
		8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	55.300.390	39 Paket	45.898.066	5 Paket	6.276.811	1 Paket	432.000			1 Paket	432.000	40 Paket	46.330.066	80,00%	83,78%		
		8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	646.518.750	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah P yang Disediakan aket Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	64.237.056	1 Paket	13.626.130	-	-	-	-			-	-	1 Paket	13.626.130	20,00%	21,21%		
		8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	125.391.080	19 Paket	85.969.203	4 Paket	22.536.863	1 Paket	8.570.000			1 Paket	8.570.000	20 Paket	94.539.203	83,33%	75,40%		
		8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26 Paket	168.992.252	19 Paket	61.164.000	7 Paket	22.911.767	1 Paket	1.964.000			1 Paket	1.964.000	20 Paket	63.128.000	76,92%	37,36%		
		8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	10 Dokumen	58.350.167	6 Dokumen	4.970.000	-	0	-	0			-	0	6 Dokumen	4.970.000	60,00%	8,52%		
		8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	689.620.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	104.050.659	4 Laporan	24.840.100	2 Laporan	5.940.000	-	231.000			-	231.000	4 Laporan	25.071.100	66,67%	24,10%		
		8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	1.019.425.581	16 Laporan	838.585.801	1 Laporan	163.376.500	-	41.296.620			-	41.296.620	16 Laporan	879.882.421	80,00%	86,31%		
		8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Laporan	64.651.875	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	0,00%		

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penang gung Jawab		
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(13)	14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)		
		8 01 01 2.06 001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	64.651.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
		8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	85%	7.486.990.746	59,35%	383.093.591	26%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	59,35%	383.093.591	69,82%	5,12%		
		8 01 01 2.07 000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	862.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8 01 01 2.07 000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	862.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8 01 01 2.07 000 3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	862.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8 01 01 2.07 000 4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	862.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8 01 01 2.07 000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	50 Unit	560.316.250	47 Unit	111.568.000	28 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 Unit	111.568.000	94,00%	19,91%	
		8 01 01 2.07 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	55 Unit	245.980.746	50 Unit	271.525.591	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Unit	271.525.591	83,33%	110,38%	
		8 01 01 2.07 000 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	646.518.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		8 01 01 2.07 000 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit	646.518.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		8 01 01 2.07 000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	646.518.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		8 01 01 2.07 001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	646.518.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		8 01 01 2.07 001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	646.518.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)	SKPD Penang gung Jawab						
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					(9)	(10)	(11)	(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		(16)								
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)	
		8 01 01 2,08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	100%	1.209.914.438	75%	676.303.109	25%	351.261.665	4%	21.033.748					4%	21.033.748	78,60%	697.336.857	78,60%	57,64%			
		8 01 01 2,08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	163.233.408	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	0,00%	0,00%			
		8 01 01 2,08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	152.141.366	4 Lapora n	74.772.750	1 Laporan	42.547.200	-	9.492.748					-	9.492.748	4 Laporan	84.265.498	66,67%	55,39%			
		8 01 01 2,08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	86.202.500	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	0,00%			
		8 01 01 2,08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	808.337.164	8 Lapora n	580.496.611	1 Laporan	308.714.465	-	11.541.000					-	11.541.000	8 Laporan	592.037.611	80,00%	73,24%			
		8 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	85%	2.028.854.486	62,82%	585.258.780	20%	137.132.000	8,50%	58.433.500					8,50%	58.433.500	71,32%	643.692.280	83,91%	31,73%			
		8 01 01 2,09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	533.463.772	14 Unit	166.340.464	1 Unit	41.090.000	1 Unit	10.170.000					1 Unit	10.170.000	15 Unit	176.510.464	60,00%	33,09%			
		8 01 01 2,09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	150.854.375	14 Unit	68.691.816	6 Unit	43.050.000	2 Unit	12.859.500					2 Unit	12.859.500	16 Unit	81.551.316	80,00%	54,06%			
		8 01 01 2,09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	150.854.375	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	0,00%		
		8 01 01 2,09 0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	150.854.375	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	0,00%		
		8 01 01 2,09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	49.651.875	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	0,00%		
		8 01 01 2,09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	17.523.413	44 Unit	15.625.000	17 Unit	6.900.000	3 Unit	1.330.000						3 Unit	1.330.000	47 Unit	16.955.000	78,33%	96,76%		
		8 01 01 2,09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	17.523.413	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	0,00%	

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV										
									(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	
									Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)	
		8	01	01	2,09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	17.523.413	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	0,00%		
		8	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	326.648.685	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	0,00%		
		8	01	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	398.450.540	3 Unit	276.168.000	3 Unit	46.092.000	2 Unit	34.074.000							2 Unit	34.074.000	5 Unit	310.242.000	83,33%	77,86%			
		8	01	01	2,09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	107.753.125	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	0,00%		
		8	01	01	2,09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0,05 Ha	107.753.125	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	0,00%		
2.	Sasaran 6.2 RPJMD: Meningkatkan Partisipasi Warga dalam Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang Meningkatkan Wawasan Kebangsaannya	14000 Orang	5.788.797.536	7253 Orang	979.627.495	500 Orang	824.999.557	87 Orang	-							87 Orang	-	7340 Orang	979.627.495	52,43%	16,92%			
	Sasaran 3 Cascading: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	105 Upacara	5.788.797.536	47 Upacara	979.627.495	21 Upacara	824.999.557	1 Upacara	-							1 Upacara	-	48 Upacara	979.627.495	45,71%	16,92%			
		8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5 Dokumen	21.506.250	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	0,00%	0,00%			
		8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5 Doukumen	21.506.250	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	0,00%			

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
									(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	
									Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)	
			8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	409.461.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	14000 Orang	1.577.779.411	7253 Orang	405.310.105	500 Orang	-	87 Orang	-								87 Orang	-	7340 Orang	405.310.105	52,43%	25,69%	
			8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5 Laporan	366.360.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	75 Keluarga	775.822.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Pumapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Pumapaskibraka	5 Dokumen	366.360.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	219 Orang	2.250.000.000	73 Orang	574.317.390	73 Orang	824.999.557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 Orang	574.317.390	33,33%	25,53%	
3.	Sasaran 6.2 RPJMD: Meningkatkan Partisipasi Warga dalam Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pemahaman Politik di Kalangan Masyarakat/ Aparatur Daerah Serta Terciptanya Stabilitas Politik Pemerintahan yang Kondusif di Daerah	85%	51.268.643.557	60%	55.065.049.239	25%	1.101.536.414	0,00%	-									0,00%	-	60%	55.065.049.239	70,59%	107,40%	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab						
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	14 = 7 +13	15 = 14/6 X 100 %	(16)
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)				
	Sasaran 3 Cascading: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah	10 Dokumen	51.268.643.557	8 Dokumen	55.065.049.239	2 Dokumen	1.101.536.414	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Dokumen	55.065.049.239	80,00%	107,40%	
		8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	645.518.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	215.506.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.300	8.620.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
											I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		(16)										
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)			
4.	Sasaran 6.2 RPJMD: Meningkatkan Partisipasi Warga dalam Menjaga Lingkungan Secara Mandiri Sasaran 3 Cascading: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130 Orang	40.927.135.417	104 Orang	54.641.703.589	22 Orang	1.101.536.414	-	-					-	104 Orang	54.641.703.589	80,00%	133,51%		
		8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Laporan	860.233.140	8 Laporan	423.345.650	2 Laporan	-	-	-				-	8 Laporan	423.345.650	80,00%	49,21%			
		8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Orams yang Melaksanakan Aktivitas Sesuai Regulasi	83 Ormas	1.488.580.547	69 Ormas	77.868.350	83 Ormas	43.463.100	4 Ormas	5.958.760					4 Ormas	5.958.760	73 Ormas	83.827.110	87,95%	5,63%	
		8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas/LSM yang Memiliki Legalitas	83 Ormas	1.488.580.547	69 Ormas	77.868.350	83 Ormas	43.463.100	4 Ormas	5.958.760					4 Ormas	5.958.760	73 Ormas	83.827.110	87,95%	5,63%	
		8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	115.854.375	-	-	-	-	-	-					-	-	-	0,00%	0,00%		
		8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	86.202.500	-	-	-	-	-	-					-	-	-	0,00%	0,00%		

[illegible]

No	Sasaran	Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
														I		II		III		IV										
														(1)	(2)	(3)				(4)	(5)								(6)	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)		
6.		8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	409.461.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	750 Orang	1.723.624.707	570 Orang	133.069.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570 Orang	133.069.140	76,00%	7,72%			
		8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1500 Orang	3.604.953.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			
		8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10 Laporan	480.609.879	6 Laporan	77.536.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Laporan	77.536.176	60,00%	16,13%				
		Sasaran 6.2 RPJMD: Meningkatkan Partisipasi Warga dalam Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik yang ditangani	100%	8.670.038.645	80%	1.382.805.177	20%	215.000.000	5%	3.513.350							5%	3.513.350	85%	1.386.318.527	85,00%	15,99%	
	Sasaran 3 Cascading: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti	50 Konflik	8.670.038.645	39 Konflik	1.382.805.177	10 Konflik	215.000.000	4 Konflik	3.513.350							4 Konflik	3.513.350	43 Konflik	1.386.318.527	86,00%	15,99%		

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penang gung Jawab	
															(1)	(2)	(3)					(4)								(5)
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)	
			8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	323.259.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
			8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	1.372.036.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
			8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250 Orang	2.155.062.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
			8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1250 Orang	4.043.899.191	975 Orang	1.205.253.020	60 Orang	85.000.000	85 Orang	-						85 Orang	-	1060 Orang	1.205.253.020	84,80%	29,80%		

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV								
															(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)		
		8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Laporan	495.622.584	8 Laporan	102.964.207	2 Laporan	-	-	-							-	-	8 Laporan	102.964.207	80,00%	20,77%	
		8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	280.158.125	2 Dokumen	74.587.950	2 Dokumen	130.000.000	-	3.513.350							-	3.513.350	2 Dokumen	78.101.300	20,00%	27,88%	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA																									67,38%	31,89%			
PERINGKAT KINERJA																									S	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:								: a. Akses terhadap sumber daya yang memadai, baik berupa fasilitas, teknologi, atau anggaran, dapat mempermudah penyelesaian tugas dan meningkatkan kinerja; b. Kemampuan untuk mengatur waktu secara efisien dan prioritas tugas akan mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil kerja; c. Pembinaan dan pelatihan individu (SDM) untuk meningkatkan kinerja melalui pengembangan keterampilan baru.																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:								: a. Tidak ada anggaran pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sehingga belum dapatnya terlaksana pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; b. Tidak adanya Sumber Daya Manusia (Analisis Kebijakan) yang melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:								: a. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja OPD dapat cepat diketahui; b. Setiap PPTK perlu upaya ekstra agar capaian kinerja program dan kegiatan dapat tercapai lebih cepat sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan daerah/ perangkat daerah.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:								: a. Kepala OPD hendaknya lebih menata strategi dalam pengendalian pelaksanaan/ pemantauan dan evaluasi pada Organisasi Perangkat kerjanya; b. Dalam pengisian tabel pada Laporan RKPD selalu berkoordinasi dengan Bapedalitbang.																					

Painan, 9 April 2025

Kepala Badan Ketahanan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan



GESTI JONI, S.Pd., M.M.
NIP. 19691106 199603 1 002